



Judul : Menguji Argumen "Bank Dunia" Versus "Menteri Purbaya"
Tanggal : Jumat, 17 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Jika di Q1 tumbuh 5,5 persen karena ada belanja pemerintah atau faktor musiman, Bank Dunia memprediksi akan terjadi kelelahan di semester kedua tahun 2026. Benarkah?

Oleh Rahma Gafmi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap laporan terbaru Bank Dunia (World Bank) yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen untuk tahun 2026. Purbaya menilai perhitungan tersebut tidak akurat dan cenderung mengabaikan data faktual domestik yang menunjukkan penguatan signifikan.

Perbedaan angka ini dipicu oleh beberapa asumsi yang digunakan oleh Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026. Bank Dunia terlalu terpaku pada lonjakan harga minyak akibat ketegangan geopolitik yang dianggap Purbaya bersifat sementara.

Menkeu sangat khawatir ada efek psikologis pasar dan menyayangkan proyeksi rendah ini karena dapat menciptakan sentimen negatif yang tidak berdasar bagi investor. Pemerintah melihat daya beli masyarakat dan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menjadi pendorong utama ekonomi yang belum sepenuhnya dihitung oleh lembaga internasional.

Meski data resmi BPS untuk triwulan pertama belum dipublikasikan, Menkeu Purbaya berani memasang badan dengan estimasi 5,5 persen. Langkah ini bukan sekadar optimisme buta, melainkan sebuah hitung-hitungan matematis untuk menunjukkan bahwa ramalan Bank Dunia sebesar 4,7 persen hanya akan terjadi jika Indonesia menghadapi guncangan hebat yang mampu melumpuhkan momentum ekonomi di sisa tahun ini sebuah skenario yang menurut dia sangat jauh dari realitas fundamental saat ini.

Strategi komunikasi Purbaya di sini adalah melakukan *preemptive strike* atau serangan balik lebih awal untuk menjaga ekspektasi pasar, meskipun data resmi BPS untuk kuartal I-2026 biasanya baru akan rilis di bulan Mei.

Bank Dunia salah hitung?

Jika kita menanggalkan kaca mata optimisme pemerintah dan melihat data dari sudut pandang Bank Dunia, proyeksi 4,7 persen tersebut sebenarnya memiliki basis argumen yang cukup kuat dalam konteks krisis global 2026.

Bank Dunia biasanya melihat Indonesia sebagai bagian dari ekosistem ekonomi global. Jika terjadi krisis fiskal di negara-negara maju atau sesama *emerging markets*, dampaknya akan masuk ke Indonesia melalui dua jalur utama.

Pertama, krisis fiskal global memicu kenaikan imbal hasil (*yield*) obligasi. Jika investor global menganggap risiko meningkat, mereka akan menarik modal dari Indonesia (*capital outflow*), memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Ini akan mengerem kredit perbankan dan konsumsi yang selama ini dibanggakan Purbaya.

Kedua, andaikan mitra dagang utama seperti China atau AS mengalami perlambatan fiskal, permintaan akan komoditas andalan Indonesia batu bara, sawit, nikel akan anjlok.

Meskipun Purbaya optimistis dengan APBN, Bank Dunia mungkin melihat adanya risiko Fiscal Crack. Ini terjadi ketika pemerintah mencoba menahan defisit anggaran agar tetap sehat, tetapi dampaknya justru mengurangi stimulus bagi masyarakat. Program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan biaya masif. Jika penerimaan negara dari komoditas menurun akibat harga global jatuh, pemerintah mungkin terpaksa memotong belanja produktif lainnya untuk menjaga defisit di bawah 3 persen. Inilah yang dihitung Bank Dunia sebagai faktor penghambat pertumbuhan.

Secara historis, ekonomi Indonesia memang sangat stabil di kisaran 5,0 persen. Namun, Bank Dunia sering menerapkan

prinsip konservatif, mereka menghitung skenario terburuk (*worst-case scenario*). Jika di Q1 tumbuh 5,5 persen karena adanya *front-loading* belanja pemerintah atau faktor musiman, Bank Dunia memprediksi akan terjadi kelelahan di semester kedua tahun 2026.

Jadi, siapa yang benar?

Secara teknis, keduanya bisa benar dalam konteks yang berbeda. Purbaya benar jika mesin domestik UMKM, hilirisasi, dan konsumsi mampu mengkompensasi hilangnya pendapatan ekspor.

Sebaliknya, Bank Dunia juga bisa benar jika badai fiskal global ternyata lebih besar dari kemampuan APBN untuk menahannya.

Dalam dunia makroekonomi, proyeksi bukan sekadar ramalan nasib, melainkan instrumen kebijakan. Purbaya menggunakan angka 5,5 persen untuk memacu psikologi pasar, sementara Bank Dunia menggunakan 4,7 persen untuk mengingatkan pemerintah agar tetap disiplin fiskal di tengah ketidakpastian global.

Dari sudut pandang Bank Dunia memang sangat dipengaruhi oleh posisi Indonesia sebagai ekonomi terbuka kecil (*small open economy*) yang masih memiliki ketergantungan pada faktor eksternal. Dalam bahasa pasar keuangan, Bank Dunia melihat Indonesia melalui lensa interkoneksi global.

Bank Dunia menyoroti bahwa ekonomi Indonesia masih sangat sensitif terhadap kebijakan moneter negara maju, terutama bank sentral AS (The Fed).

Andaikan krisis fiskal global memburuk, investor cenderung melakukan *flight to quality* memindahkan aset ke negara yang dianggap paling aman seperti Amerika Serikat. Amerika tetap menjadi raja dunia. Karena kita semua tahu, Amerika punya *capital and manpower* yang kuat.

Pada abad ke-20 kekuatannya sangat bergantung pada skala manufaktur, jangkauan militer, dan kekuatan dolar, di abad ke-21 ini kekuatannya bergeser ke infrastruktur AI yang sangat diperlukan. Trennya sekarang semua ke sana. Tantangan bagi dunia adalah bagaimana membayar akses ke infrastruktur itu.

Saat ini, Indonesia mengalami *capital outflow* yang luar biasa, yang terburuk dalam 20 tahun. Hal ini dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah akan menyebabkan *imported inflation*, yaitu inflasi barang impor, yang pada gilirannya menekan daya beli masyarakat yang menjadi mesin utama yang diandalkan Menkeu Purbaya.

Untuk menahan modal agar tidak keluar, Bank Indonesia mungkin terpaksa mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Ini adalah "rem" bagi pertumbuhan ekonomi karena biaya pinjaman untuk ekspansi usaha menjadi mahal.

Selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada komoditas. Meskipun program hilirisasi sedang berjalan masif, struktur ekspor dan penerimaan negara Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh siklus harga komoditas global, seperti nikel, batubara, dan sawit.

Penurunan harga komoditas secara global akan langsung memangkas penerimaan pajak dan royalti (PNBP). Hal ini mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan stimulus atau membiayai proyek-proyek strategis pemerintah.

Di banyak wilayah di Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi), konsumsi masyarakat sangat bergantung pada harga komoditas. Jika harga jatuh, ekonomi di daerah tersebut melambat, yang secara kumulatif akan menurunkan angka pertumbuhan nasional.

Rahma Gafmi Guru Besar Universitas Airlangga